

**SKRIPSI**  
**PEMANFAATAN DANA PROGRAM**  
**PEMBERDAYAAN PETANI KECIL**  
(Studi di Kecamatan Bangkinang Seberang Kab. Kampar)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
**Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD LUTHFI**  
**NIM : 10425025159**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2011**

**PEMANFAATAN DANA PROGRAM  
PEMBERDAYAAN PETANI KECIL**  
(Studi di Kecamatan Bangkinang Seberang Kab. Kampar)

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD LUTHFI**  
**NIM : 10425025159**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**



## **ABSTRAK**

### **“Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil (Studi di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar)”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil bagi petani kemudian bagaimana dampak hasil pertanian masyarakat dengan adanya dana pinjaman lalu bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pemanfaatan dana pinjaman tersebut. Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan terhadap masyarakat yang meminjam dana untuk keperluan usaha taninya kepada BPP atau BPPKP Bangkinang. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil, Untuk mengetahui dampak hasil pertanian dengan adanya dana program pemberdayaan petani kecil, Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang dana program pemberdayaan petani kecil di kecamatan Bangkinang Seberang.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang menjadi anggota Kelompok Petani Kecil (KPK). Sedangkan Objek penelitiannya adalah dampak pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil (P2K) yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) dalam tinjauan ekonomi Islam. Populasi dan sampel menggunakan metode *Cluster random sampling* yaitu tiap-tiap kelompok diambil sampelnya sesuai dengan jumlah anggota pada setiap kelompok. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan dari responden melalui observasi, wawancara dan angket, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis cari. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan dana pinjaman oleh anggota KPK lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan produktif, namun ada juga yang digunakan untuk konsumtif, sedangkan hasil pertaniannya banyak yang menurun disebabkan karena usahanya tidak berjalan dengan baik, namun ada juga usahanya yang meningkat, di karenakan ia sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya.

Tinjauan ekonomi Islam menganggap bahwa pemanfaatan dana pinjaman oleh KPK yang telah sesuai atau tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati mereka mencari keridhoan Allah, sedangkan yang melanggar perjanjian berarti pertanda merosotnya keimanannya, Iman orang yang tidak lagi mengindahkan janji-janjinya telah ternoda.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis .....	11
B. Keadaan Penduduk .....	12
C. Mata Pencarian Penduduk .....	15
D. Agama dan Budaya Masyarakat .....	16
E. Sistem Kekerabatan Masyarakat .....	19
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Usaha Kecil .....	23
B. Bantuan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Bangkinang .....	26
C. Pengertian Kredit / Pinjaman .....	29
D. Prosedur Pinjaman .....	32

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil .....	42
B. Dampak Hasil Pertanian Dengan adanya Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil .....	54
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil .....	57

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA .....	62
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel. II. 1    Jumlah penduduk menurut tingkat umur di Bangkinang Seberang. Keadaan tahun 2010 .....	13
Tabel. II. 2    Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Bangkinang Seberang. Keadaan tahun 2010 .....	14
Tabel. III. 1    Tolak ukur klasifikasi usaha .....	25
Tabel. IV. 1    Tanggapan responden tentang usaha yang dijalani pada P2K di Kecamatan Bangkinang Seberang .....	46
Tabel. IV. 2    Tanggapan responden tentang besar pinjaman pada P2K Kecamatan Bangkinang Seberang .....	47
Tabel. IV. 3    Tanggapan responden mengenai apakah seluruh modal bersumber Pada P2K Kecamatan Bangkinang Seberang .....	48
Tabel. IV. 4    Tanggapan responden tentang alasan ikut meminjam pada P2K Kecamatan Bangkinang Seberang .....	49
Tabel. IV. 5    Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pinjaman .....	50
Tabel. IV. 6    Tanggapan responden tentang kepuasan setelah mendapatkan Mendapatkan Dana Pinjaman .....	51
Tabel. IV. 7    Tanggapan responden terhadap pemanfaatan pinjaman dalam Meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil .....	52
Tabel. IV. 8    Tanggapan Responden Tentang Hasil Pertanian .....	54
Tabel. IV. 9    Tanggapan responden tentang faktor yang menyebabkan hasil Pertaniannya .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berlanjut menjadi krisis ekonomi yang saat ini yang masih belum pulih. Dari krisis ini hanya usaha skala besar yang terpaksa tutup, sementara usaha kecil masih tetap bertahan untuk mengelola usahanya. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya agar krisis ekonomi ini tidak berulang kembali.

Kebijakan pemerintah masa lalu yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan keberpihakan pada usaha skala besar dibandingkan kepada usaha kecil. Patut dicatat bahwa sebagian besar usaha ekonomi dikuasai oleh sedikit pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil<sup>1</sup>. Walaupun begitu fakta menunjukkan bahwa pengusaha kecil ini lebih banyak menyerap tenaga kerja dan mampu bertahan atas krisis ekonomi, namun hanya menguasai sebagian kecil perekonomian Indonesia.

Adapun tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini

---

<sup>1</sup> Fachi Yasin A.Z, *Petani, Usaha dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Press Pekanbaru, 2001) Hlm. 1



diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”<sup>2</sup>

Dilihat dari situasi saat ini, kondisi para petani yang ada di kecamatan Bangkinang Seberang sangat tidak mungkin untuk menjalankan usahanya karena keterbatasan modal, karena dengan adanya modal para petani kecil tersebut dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.

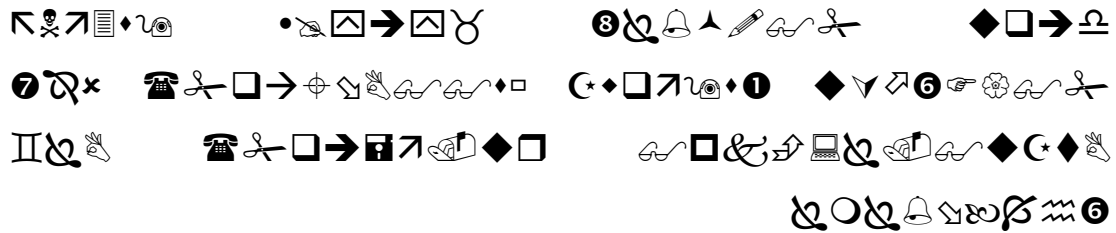
Di Kabupaten Kampar terdapat Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) yaitu suatu program pemberdayaan petani kecil melalui pinjaman usaha untuk petani kecil. Untuk mengurangi penduduk miskin tersebut salah satu program yang sedang dilaksanakan pemerintah melalui kantor BPPKP adalah program Pemberdayaan Petani Kecil (P2K). program ini telah dimulai sejak tahun 2002 yang dibiayai melalui dana APBD Kabupaten Kampar, dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam pengentasan Kemiskinan.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafka. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat, Al-Mulk: 15

---

<sup>2</sup> Drs. Arifin Sitio, M.sc. *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001). Hlm. 128



Yang artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya”*. (Al-Mulk: 15)<sup>3</sup>

Dari ayat diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya, manusia dianjurkan mempunyai kemapanan ekonomi yang kuat untuk lebih mendekatkan dirinya dan bersyukur atas karunianya yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia itu sendiri.

Setiap para Kelompok Petani Kecil (KPK) mengajukan permohonan melalui Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, setelah diteliti kelengkapan administrasinya oleh pengelola data di BPP, bagi pemohon yang memenuhi persyaratan direkomendasi oleh kepala BPP selanjutnya dikirimkan ke Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kab. Kampar.

Berkas permohonan yang telah sampai di BPPKP, oleh tim pembina dan pengendalian (Tim Bindal) BPPKP kembali diperiksa kelengkapan persyaratan (Adm) tersebut. Bagi KPK yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan dan pembinaan terhadap anggota kelompok yang mengajukan pinjaman.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005)  
Hlm. 563

Hasil peninjauan oleh Tim Bindal dari lapangan dibuat dalam bentuk laporan, berdasarkan laporan tersebut Tim Bindal mengadakan rapat terakhir pemutusan kredit dan disusun dalam bentuk berita acara yang disusun oleh Tim Bindal, maka kepala BPPKP membuat rekomendasi global untuk selanjutnya dikirimkan ke Bank BPR Sari Madu Bangkinang melalui Tim verifikasi dana bergulir Kab. Kampar.

Pada Tim Verifikasi dana bergulir Kab. Kampar yang diwakili oleh masing-masing Dinas. Kembali dibahas untuk selanjutnya direkomendasi dan dikirimkan ke BPR Sari Madu untuk selanjutnya dijadwalkan penanda tanganan akad kredit/pencairan dana bergulir.

Seiring dengan KPK mendapatkan bantuan dana bergulir itu untuk membantu usaha yang dijalankannya, disetiap kelompok tersebut ada yang menggunakan dana bergulir tersebut untuk keperluan usahanya dan ada juga untuk keperluan pribadi / rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan dan keterangan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“PEMANFAATAN DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI KECIL (Studi di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar)**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis menentukan identifikasi masalah, maka penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil (Studi di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar)

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil.
2. Bagaimana dampak hasil pertanian dengan adanya dana program pemberdayaan petani kecil.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil.
  - b. Untuk mengetahui dampak hasil pertanian dengan adanya dana program pemberdayaan petani kecil.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang dana program pemberdayaan petani kecil.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis terutama masyarakat umum untuk lebih mengenal bagaimana pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran guna penelitian lebih lanjut.
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan formal pada perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Suska Khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasinya penelitian ini dilakukan di Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar kerana melihat selama ini di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, yang mana mereka membutuhkan modal untuk berusaha melalui BPPKP, yang mana masyarakat ini mempunyai tarap hidup ekonomi menengah ke bawah,

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang menjadi anggota Kelompok Petani Kecil (KPK). Sedangkan Objek penelitiannya adalah dampak pemanfaatan dana program

pemberdayaan petani kecil (P2K) yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP).

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para kelompok usaha mikro yang mengajukan permohonan dana program ke Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP), yaitu sebanyak 75 kelompok yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang. Dengan rincian 7 kelompok beranggotakan 6 orang, 16 kelompok beranggotakan 7 orang, 17 kelompok beranggotakan 8 orang, 9 kelompok beranggotakan 9 orang, 11 kelompok beranggotakan 10 orang, 1 kelompok beranggotakan 11 orang, 2 kelompok beranggotakan 12 orang, 1 kelompok beranggotakan 15 orang, dan 1 kelompok beranggotakan 16 orang. Karena terlalu banyak dan perlu adanya pertimbangan waktu, tenaga, dan dana, jadi Penulis hanya mengambil 6 kelompok, maka sample ditentukan dengan menggunakan *Cluster random sampling*<sup>4</sup>. Yaitu tiap-tiap kelompok diambil sampelnya sesuai dengan jumlah anggota pada setiap kelompok.

Jadi populasi seluruhnya berjumlah 467, penulis hanya mengambil 6 kelompok dengan rincian 1 kelompok beranggotakan 7 orang, 1 kelompok beranggotakan 10 orang, dan 4 kelompok beranggotakan 8 orang, jadi penulis hanya mengambil sampel 49 orang.

---

<sup>4</sup> *Cluster Random Sampling* adalah Sampel dalam bentuk kelompok bukan individu, jadi subjek dalam sampel ini adalah rata-rata dari kelompok atau unitnya. Dalam Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1988) Hlm. 75

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden melalui Observasi, wawancara dan angket.

##### b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah penulis akan turun langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar
- b. Wawancara adalah penulis melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung maupun tidak langsung mengenai masalah data yang penulis perlukan dalam penelitian.
- c. Angket adalah penyuguhan beberapa angket yang bersifat pertanyaan ganda yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- d. Pustaka adalah penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, lalu digambarkan dengan kata-kata

## 7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Deduktif yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian ini maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Terdiri dari Pendahuluan, yang menerangkan Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan



- BAB II** : Bab ini menjelaskan tentang letak geografis daerah, keadaan sosial budaya masyarakat Bangkinang Seberang dan sistem kekerabatan Masyarakat Adat Bangkinang Seberang,
- BAB III** : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi: usaha kecil, Bantuan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Bangkinang, pengertian kredit / pinjaman dan prosedur pinjaman.
- BAB IV** : Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berkenaan dengan pemanfaatan dana program pemberdayaan petani kecil, dampak hasil pertanian dengan adanya dana program pemberdayaan petani kecil, dan di tinjauan ekonomi Islam tentang dana program pemberdayaan petani kecil.
- BAB V** : Merupakan bab kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis**

##### **1. Letak, luas dan batas-batas wilayah**

Bangkinang Seberang secara administrasi pemerintahan, berada di bawah Kabupaten Kampar, dengan luas daerahnya sekitar 32,621 ha, Bangkinang Seberang terletak di sepanjang kiri – kanan jalan negara, antara lokasi Transmigrasi dan kota Bangkinang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salo

Bangkinang Seberang merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bangkinang, berdasarkan Perda No. 22 tahun 2003, diresmikan pada tanggal 16 Desember 2005.

Bangkinang Seberang terletak disebelah selatan Kecamatan Bangkinang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar, dengan jarak kurang lebih 1,2 kilo meter, sedangkan dari Kota Pekanbaru diperkirakan jaraknya sekitar 63 km.

## 2. Keadaan tanah

Dilihat dari letak dan keadaan geografis Bangkinang Seberang sebagian besar penduduknya bergerak dalam struktur pertanian, terutama dalam sub-sektor perkebunan dengan komoditi utama tanaman karet.

## 3. Keadaan iklim

Kondisi tanah yang berbukit-bukit mengakibatkan daerah ini dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata antara 26°C sampai dengan 29°C. Sementara itu curah hujan dapat dikatakan cukup tinggi.

## 4. Flora dan Fauna

Di Bangkinang Seberang terdapat hutan yang luas, yang ditumbuhi berjenis-jenis kayu, dan didiami oleh berjenis-jenis spesies binatang, baik binatang liar maupun binatang piaraan.

# **B. Keadaan Penduduk**

## 1. Penduduk menurut jumlah

Berdasarkan data tahun 2010 penduduk Bangkinang Seberang berjumlah 28.356 jiwa. Pada umumnya merupakan penduduk asli (pribumi)

Dari kondisi demografi ini, maka pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk umur, tahun 2010

**Tabel. II. 1**

**Jumlah penduduk menurut tingkat umur di Bangkinang Seberang.  
Keadaan tahun 2010**

<b>No</b>	<b>UMUR</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1	00 – 10	1.352	4,77
2	11 – 20	3.543	12,49
3	21 – 30	6.450	22,75
4	31 – 40	9.922	34,99
5	41 – 50	4.821	17,00
6	51 tahun ke atas	2.268	8,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.356</b>	<b>100</b>

Sumber data : kantor Camat Bangkinang Seberang, Tahun 2010

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak produktif berjumlah 1.352 jiwa (4,77 %), yaitu penduduk yang berumur antara 00 – 10 tahun, sedangkan penduduk yang kurang produktif berjumlah 3.543 jiwa (12,49 %), yaitu penduduk yang berumur antara 11 – 20 tahun, dan untuk jumlah penduduk yang usia produktif berjumlah 23.461 jiwa (82,74 %), yaitu penduduk yang berusia antara 21 – 51 tahun ke atas.

## 2. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Kondisi penduduk menurut mata pencaharian di Bangkinang Seberang ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. II. 2**

**Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Bangkinang Seberang,  
Keadaan Bulan April 2010**

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>%</b>
1	Tidak Bekerja	8.715	30,73
2	Wiraswasta	1.582	5,58
3	Tani (dalam arti luas)	12.993	45,82
4	Pertukangan	226	0,81
5	Buruh	3.441	12,13
6	Pedagang	845	2,98
7	PNS / ABRI	554	1,95
	<b>Jumlah</b>	<b>28.356</b>	<b>100</b>

Sumber data : Kantor Camat Bangkinang Seberang, keadaan tahun 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 8.715 orang (30,73 %) dari jumlah penduduk yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan termasuk masyarakat yang tidak bekerja. Sedangkan penduduk yang bergerak pada sektor wiraswasta berjumlah 1.582 orang (5.58 %), dan pada sektor mata pencaharian produktif pertanian pada masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang berjumlah 12.993 orang (45.82 %), dan pertukangan 226 orang (0,81 %), pedagang 845 orang (2,98 %) dan PNS / ABRI berjumlah 554 orang (1,95).

## **C. Mata Pencaharian Penduduk**

### **1. Mata Pencaharian**

Di muka telah diuraikan bahwa penduduk Bangkinang Seberang sebagian diantaranya telah memiliki lapangan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, di sektor pertanian dengan status sebagai Petani dan yang bergerak dalam lapangan usaha lain seperti karyawan, wiraswasta dan pertukangan.

Dilihat dari kondisi geografis dan banyaknya penduduk yang memiliki status sebagai petani, sebagai mana diutarakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bangkinang Seberang dapat digolongkan kepada Desa agraris, karena sebagian besar penduduknya berusaha dalam sektor pertanian.

Hal ini juga dimiliki oleh masyarakat yang bergerak dan berprofesi dalam sektor lain, selain bertani, disamping mereka berusaha di bidangnya juga mengusahakan sawah atau kebun yang mereka miliki dan peroleh secara turun-temurun.

### **2. Sektor Perhubungan**

Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup melalui proses pembangunan. Perkembangan suatu daerah akan lebih maju dengan lancarnya perhubungan ini, terutama dalam proses lalu-lintas barang, orang dan jasa. Dan adapun 2 jenis alat transportasi umum, yaitu Becak (motor) dan Oplet.

#### **D. Agama dan Budaya Masyarakat**

Dalam sektor keagamaan penduduk Bangkinang Seberang mayoritas seluruhnya beragama Islam. Tempat peribadatan cukup banyak, seperti masjid dan mushalla. Masjid berjumlah 30 dan mushalla berjumlah 62

Dalam hubungan sehari-hari adat-istiadat memainkan pengaruh yang sangat penting sekali. Adat-istiadat di daerah ini hampir sama dengan adat-istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukkan dengan garis keturunan yang menganut sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Demikian juga dengan kesenian dan bahasanya yang sangat mirip dengan bahasa dan kesenian di daerah Minangkabau.

Adat merupakan tradisi turun-temurun yang dipraktekkan dalam hampir di setiap segmen kehidupan masyarakat. Untuk prosesi perkawinan di Bangkinang Seberang, terlebih dahulu dilakukan musyawarah di antara keluarga kedua belah pihak, yaitu untuk menetapkan hari perkawinan dan peresmian (pesta), baik dilakukan secara bersamaan (hari itu juga), maupun secara terpisah-pisah (dilakukan dihari dan kesepekatan lainnya), tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Upacara perkawinan dilakukan menurut ketentuan adat, di mana pihak laki-laki diantar keluarganya kerumah pihak perempuan dengan “dulang-dulang” yang isinya sebagian berisi keperluan pengantin perempuan. Setelah perkawinan

diselenggarakan, pihak laki-laki (pengantin laki-laki) menetap tinggal di rumah perempuan sekaligus menjadi “urang sumando” bagi pihak keluarga perempuan.<sup>5</sup>

Mengenai biaya pelaksanaan perkawinan dan pesta tergantung kepada hasil musyawarah dan kemufakatan kedua belah pihak keluarga pengantin tersebut.

Setelah prosesi perkawinan dilaksanakan, yang dilanjutkan dengan peresmian (pesta), sejak itu pengantin laki-laki sebagai menantu dan “Urang Sumando” sudah diperbolehkan menggarap sawah atau tanah pertanian dari pihak perempuan, dalam arti hak pakai. Sedangkan hak milik tetap berada di tangan pihak perempuan.<sup>6</sup>

Adat kepenghuluan, sebagai manifestasi kekuasaan secara adat, masih terasa sangat kuat dan umumnya dipengaruhi oleh para ninik mamak. Ninik mamak merupakan orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dalam kampung, ataupun didahulukan sekata dalam perkataan. Sebagaimana disebutkan anak kemenakan (anak dan Kaponakan) itu merupakan rakyat para ninik mamak dalam sistem pemerintahan adat.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Datuk Malin Majo, tanggal 25 Maret 2011

<sup>6</sup> Wawancara dengan Datuk Sinaro, tanggal 27 Maret 2011



Yang dimaksud anak kemenakan di sini adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Anak, yaitu setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilahirkan dari hasil percampuran perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibolehkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Kemenakan, yaitu rakyat dari setiap ninik mamak menurut sistem pemerintahan adat, pucuk adat masih memakai pucuk adat nageri limo koto yang dipimpin oleh beberapa orang datuk, yaitu:
  - a) Datuk bandaro mudo, suku Mandailing
  - b) Datuk mudo, suku Malayu
  - c) Datuk jo bosou, suku malayu jo bosou
  - d) Datuk sinaro, suku Putopang.

Pengangkatan penghulu dalam terminologi adat dikenal dengan tiga istilah, yaitu:

1. Hidup bekarelaan, yaitu orang yang memakai gelar penghulu, karena sudah tua dan tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya, yang diistilahkan dengan “ bukit tidak terdaki lagi dan lurah tidak terturuni lagi”, maka gelar boleh diberikan kepada kemenakan yang dipercayakan.
2. Basalin basah, yaitu di mana orang yang memakai gelar sudah meninggal dunia, pada hari kematian itu gelar pusaka (penghulu) yang ada dipindahkan kepada kemenakannya dan diumumkan pada waktu itu.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

3. Membangkit tareh tarandam, yaitu di mana dalam persukuan belum ada yang menerima gelar pusaka kaum, maka diadakan musyawarah mencari dan menetapkan orang yang akan memangku jabatan atau gelar penghulu tersebut.

Puncak adat dalam Bangkinang Seberang sampai saat ini adalah:

1. Datuk Dubalang Kayo, dibidang dubalang adat.
2. Datuk Paduko Sirajo, dibidang hakim adat, dalam arti menyelesaikan silang sengketa dalam adat.
3. Datuk Ulak Sumano, dibidang urusan pengangkatan ninik mamak (penghulu)
4. Datuk jo Deko, bidang urusan wilayah hutan.

#### **E. Sistem Kekerabatan Masyarakat**

Semenjak dahulu kala, sistem-sistem kekerabatan menarik perhatian para ahli ilmu-ilmu sosial maupun kalangan ilmuan lainnya. Hal ini, terutama disebabkan karena manusia ingin mengetahui sejarah perkembangan kehidupan keluarga dalam masyarakat, sebagai sebuah sistem yang menyeluruh.

Kekerabatan sering dipergunakan dalam arti “kekerabatan dari perkawinan”. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam adat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (plural) mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Dengan demikian kekerabatan merupakan hubungan daerah di antara keluarga tersebut.

Pada kebanyakan masyarakat, seorang anak dipandang sebagai keturunan dan sebagai keturunan orang tuanya. Anak tersebut mempunyai hubungan

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). Hlm. 23

kekerabatan yang dapat ditelusuri. Kekkerabatan yang ditelesuri melalui ayah, disebut “paternal” atau “patrilinial”, sedangkan yang melalui Ibu, lazimnya disebut “maternal” atau matrilineal”<sup>9</sup>.

Prinsip-prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan-hubungan kekerabatan, karena prinsip tersebut menentukan siapakah yang masuk batas hubungan kekerabatan dan siapa yang secara biologis berada di luar batas tersebut. Prinsip keturunan patrilineal adalah yang mendasari hubungan kekerabatan hanya kepada laki-laki saja. Konsekuensinya, bagi tiap-tiap individu dan semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya. Sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh di luar itu.<sup>10</sup> Prinsip garis keturunan matrilineal menghubungkan garis keturunan dan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja. Konsekuensinya, bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang keluarga bapaknya jatuh diluar itu.<sup>11</sup>

Di Bangkinang Seberang menganut sistem matrilineal, yaitu menarik keturunan dari pihak ibu. Hal ini disebabkan daerah Kabupaten Kampar, adatnya dipengaruhi oleh adat Minangkabau. Untuk itu setiap laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan, sebagai tali darah, hanya kepada garis ibu. Sedangkan keturunan laki-laki tidak termasuk keturunan atau kekerabatan tersebut, karena

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981). Hlm. 91

<sup>11</sup> *Ibid.*

dalm sistem matrilenial laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.

Dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang masih kuat berpegang pada tata cara adat yang diwariskan secara turun temurun. Seorang bujang atau keluarganya ingin meminang seorang gadis, atau keluarga si gadis ingin melamar seorang bujang maka penjajakan dan peminangan dilakukan oleh keluarganya.

Apabila terjadi pertunangan maka diperlukan adanya ikatan, yang dalam istilah adat disebut "*batali bulieh diirik batampuok bulieh dijinjing*". Untuk pesta tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga, termasuk dalam menentukan hari pestanya. Uang belanja perkawinan ada yang dibantu pihak laki-laki dan ada pula yang ditanggung pihak perempuan seluruhnya. Dalam kondisi terakhir pihak laki-laki hanya mengisi dulang untuk pihak perempuan, yang berisi sebagian keperluan dan kebutuhan perempuan.

Setelah berlangsungnya perkawinan dengan segala ketentuan adatnya, pihak laki-laki diperbolehkan mengerjakan sawah atau tanah pertanian pihak perempuan, dalam artian hak pakai, sedangkan hak milik tetap berada di pihak perempuan.

Dalam persoalan waris mewaris, masyarakat di sini mewarisi atau menerima waris dari pihak perempuan. Biasanya berupa tanah pusaka yang dikuasai oleh pihak perempuan dengan pengawasan pihak laki-laki, sebagai mamak terhadap kemenakannya.

Sistem kekerabatan dan prinsip garis keturunan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bidang-bidang hukum adat tertentu di daerah ini, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi masyarakat, seperti untuk menentukan hubungan darah (keturunan) dan hukum mewarisi.



### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Usaha Kecil**

Musseman dan Hughes menyatakan bahwa ada ciri-ciri dari usaha kecil dan menengah meliputi<sup>12</sup>:

1. Permodalan yang terbatas.
2. Pengalaman manajerial yang terbatas.
3. Skala ekonomi yang sangat kecil
4. Kemampuan pemasaran dan negosiasi pasar yang sangat terbatas.
5. Sistem pembukuan yang digunakan relatif sangat sederhana.
6. Margin dari usaha yang cenderung tidak maju karena persaingan yang sangat tinggi

Usaha kecil adalah kegiatan rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih yang paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.

---

Hlm. 126 <sup>12</sup> Drs. Zulkarnain, M.M, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2003)

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 127

Beberapa keuntungan usaha kecil antara lain adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi pada pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan usaha berskala besar.
5. Terdapat dinamisme manajerial dan kewirausahaan.

Ciri-ciri usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2. Tanpa staf yang berlebihan.
3. Pembagian kerja yang kendur.
4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
5. Aktivitas yang sedikit informal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
6. Kurang perbedaan asset pribadi dengan usaha.

Konsekuensi dari perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar, yang telah mempergunakan teknologi modern yang modal cukup besar dan sistem pasar yang jelas serta manajemennya.

---

<sup>14</sup> Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) Hlm. 13-14

Adapun perusahaan besar sebagai bapak angkat dan atas kesadarannya membantu perusahaan kecil terdiri dari:

1. BUMN / BUMD
2. Industri – industri hulu.
3. Bank – bank swasta.
4. Dan lain – lain.

Permasalahan yang sering dihadapi usaha mikro adalah manajemen usaha, kualitas SDM, skala, teknik produksi, serta terbatasnya akses pembinaan usaha (modal usaha) kepada perbankan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya.<sup>15</sup>

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

**Tabel. III. 1**

**Tolak Ukur Klasifikasi Usaha**

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah tenaga kerja	< 4 orang	5 – 19 orang	20 – 99 orang	> 100 orang

**Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009**

---

<sup>15</sup> Abdul Salam, *Koperasi Simpan Pinjam: Suistainabilitas Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta:Pancasarjana UGM, 2008). Hlm. 1



## **B. Bantuan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Bangkinang**

Pada dasarnya bantuan merupakan pertolongan yang diberikan dari seseorang atau kelompok orang kepada orang yang membutuhkan dengan maksud tertentu.

Bantuan pemerintah adalah penyediaan uang atau barang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan itu oleh pemerintah yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan atas dasar persetujuan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Adapun bentuk bantuan pemerintah berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Bantuan modal kerja atau modal usaha yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, Misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan lain-lain.
2. Bantuan investasi yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas, seperti mesin-mesin, peralatan, membangun pabrik, pendidikan, dan lain-lain.

Setiap perusahaan modal kerja untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalnya persekot pembelian bahan baku, membayar upah buruh, dan lain sebagainya, dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank lembaga lainnya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000). Hlm. 99

kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya.<sup>17</sup>

Pengertian modal kerja dikemukakan dalam beberapa konsep, yaitu:

1. Konsep Kuantitatif

Modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini disebut modal kerja bruto (*gross working capital*).

2. Konsep Kualitatif

Modal kerja dalam konsep ini adalah sebagai aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa menggunakan likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar diatas utang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini disebut modal kerja netto (*net working capital*).

3. Konsep Finansial

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (*income*). Pengertian "*non working capital*" adalah dana yang tidak menghasilkan *current incom*, atau jika menghasilkan *current income* adalah tidak sesuai dengan maksud utama didirikan perusahaan tersebut.

Bagian dari piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual itu menurut konsep ini digolongkan sebagai modal kerja potensial. *Non working capital* (bukan modal kerja) adalah dana yang dinvestasikan dalam aktiva tetap.

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 85

Jenis-jenis modal kerja digolongkan dalam:

1. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*)

Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, dengan kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan dalam:

- a. Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
- b. Modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan lugs produksi yang normal. Pengertian normal disini adalah dalam artian yang dinamis.

2. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*)

Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara:

- a. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi musiman.
- b. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur.
- c. Modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (minalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

Berapa lama periode perputaran modal kerja tergantung kepada berapa lama periode dari masing-masing komponen modal kerja tersebut. Dengan jumlah pengeluaran setiap harinya yang tetap, tetapi dengan makin lamanya periode perputaran, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin besar.

Faktor modal merupakan faktor yang utama dalam satu bidang usaha, meskipun bukan merupakan jaminan bagi keberhasilan yang harus dipenuhi. Kekurangan modal kerja bagi badan usaha dapat mengakibatkan terbatasnya kemampuan dalam mengembangkan usahanya.<sup>18</sup>

### **C. Pengertian Kredit / Pinjaman**

Kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan. Yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan yaitu memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran. Maksudnya apa bila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit

---

<sup>18</sup> Wibowo Singgih, dkk, *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000). Hlm. 69

<sup>19</sup> H. Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001). Cat. 1, Hlm. 87

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.<sup>20</sup>

Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya sangat dominan. Kredit yang dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro, ini dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang dikemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman. Tugas mengalokasikan dana yang dapat dipinjamkan di tingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu.
2. Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut
4. Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman jangka panjang dari bank untuk perusahaan yang sama.
5. Rata-rata tahunan, bulanan atau mingguan dari saldo rekening giro pemohon pada bank yang sama.

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Cet. Ke-3, Hlm. 72

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 302

Pinjaman atau hutang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:<sup>22</sup>

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan, Yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk hutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya, Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan) apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, maka utangnya wajib dihapuskan.<sup>23</sup>

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu pinjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> H. Melayu S.P. Hasibuan, *Op.cit* Hlm. 303

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),

Hlm. 300

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 301

#### **D. Prosedur Pinjaman**

Dalam menentukan kelayakan suatu pinjaman atau kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Dalam prakteknya prosedur pemberian pinjaman secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat juga ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pinjaman (kredit) oleh badan hukum sebagai berikut:<sup>25</sup>

##### **1. Pengajuan Proposal**

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu pinjaman (kredit) hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran prodaknya.
- b. Tujuan pengambilan pinjaman (kredit), dalam hal ini harus jelas apakah kredit akan memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru ( perluasan serta tujuan lainnya)
- c. Besarnya pinjaman (kredit) dan jangka waktu.
- d. Cara pemohon mengembalikan pinjaman, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah mengembalikan pinjamannya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

---

<sup>25</sup> Kasmir, *op.cit.* Hlm. 96

- e. Jaminan pinjaman (kredit) yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat.

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas – berkas yang telah dipersyaratkan seperti:<sup>26</sup>

- 1) Akte pendirian perusahaan
- 2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pinjaman.
- 3) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
- 4) N.P.W.P (Nomor Peserta Wajib Pajak)
- 5) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- 6) Daftar penghasilan bagi perseorangan
- 7) Kartu keluarga bagi perseorangan
- 8) Data objek pembiayaan dan data jaminan

## 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon pinjaman untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

## 3. Penyelidikan Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pinjaman yang disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian pinjaman (kredit). Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah mempengaruhi syarat atau tidak.

---

<sup>26</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003) Cetakan ke 2, Hlm. 140



Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pinjaman adalah:<sup>27</sup>

a. Aspek Hukum

Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon pinjaman (kredit).

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Ini merupakan aspek untuk menilai apakah pinjaman yang dibiayai akan diminati oleh konsumen di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.

c. Aspek Keuangan

Yaitu untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.

d. Aspek Teknis

Aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *lay out* gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Dalam aspek ini yang dinilai adalah pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki.

---

<sup>27</sup> Kasmir, SE.MM, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) Cet. 1, Hlm. 121-122

f. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan pada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya<sup>28</sup>,

5. Peninjauan ke Lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pinjaman (kredit). Tujuan peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai dan benar-benar ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal pinjaman.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara pertama dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan kelokasi dilapangan.

---

<sup>28</sup> *Ibit*, Hlm. 126

#### 7. Keputusan Pinjaman (kredit)

Keputusan pinjaman (kredit) adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan atministrasinya.

#### 8. Penandatanganan Akat Pinjaman (kredit) / perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutannya dari diputuskannya pinjaman (kredit). Sebelum pinjaman dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pinjaman (kredit) kemudian mengikat jaminan pinjaman dengan hipotik atau surat jaminan yang dianggap perlu.

#### 9. Realisasi Pinjaman (kredit)

Setelah akad ditandatangani maka langkah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro di bank atau koperasi yang bersangkutan.

#### 10. Penyaluran atau Penarikan Dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan kredit.

Selain itu prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit antara lain:<sup>29</sup>

- a. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan dan jumlah pinjaman (kredit) yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan pinjaman (kredit).
- b. Calon debitur mengajukan pinjaman (kredit) yang di inginkan.

---

<sup>29</sup> Malayu Hasibuan, *op.cit*, Hlm. 91

- c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
- d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya *plafond* kredit.
- e. Jika BMPK (batas maksimum pemberian kredit) disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani kedua belah pihak.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

Asas 5C adalah:

- a. Character (Watak)

Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon nasabah, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah seperti: perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya.

- b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Op.cit*, Hlm. 91-92

baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.

c. *Capital* (modal)

Modal dari calon nasabah harus di analisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur bisnis calon nasabah. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya bisnis yang dijalankan nasabah. Demikian juga mengenai tingkat likuilitas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur modal bisnis yang bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang di inginkan.<sup>31</sup>

d. *Condition* (kondisi)

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan di setujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan di tolak.

e. *Collateral* (agunan)

Agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus di analisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang di tentukan bank. Jika jawabannya ya maka kredit dapat diberikan.

---

<sup>31</sup> Malayu Hasibuan. *Op, cit.* Hlm. 107

Agunan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Personality* (kepribadian)

Kepribadian adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian pinjaman (kredit). Jika kepribadiannya baik maka pinjaman (kredit) akan diberikan, sebaliknya jika kepribadiannya jelek maka pinjaman (kredit) tidak akan diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjaman. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya.

2. *Party*

*Party* adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, serta loyalitasnya, nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas dari bank.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 107

<sup>33</sup> Kasmir, *Op. Cit.* Hlm. 93

### 3. *Perpose* (tujuan)

Tujuan dan penggunaan pinjaman oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau tidak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja, maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

### 4. *Prospect*

Untuk menilai prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya, jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

### 5. *Payment* (pembayaran)

Pembayaran adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas pembayaran ini harus

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar.<sup>34</sup>

#### 6. *Profitability*

*Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pinjaman (kredit).

#### 7. *Protection*

*Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

Jadi apabila pemberian kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit (pinjaman) diharapkan lancar, karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual agunan yang telah ada.

---

<sup>34</sup> Malayu Hasibuan, *op. Cit.* hlm. 108





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil**

Sebelum mengetahui pemanfaatan dana dari program pemberdayaan petani kecil terlebih dahulu kita mulai melalui beberapa tahapan mulai dari pengajuan proposal pinjaman dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pinjaman sampai tahap pencairan. Tahap-tahap dalam pemberian pinjaman ini kita kenal dengan sebutan prosedur pemberian pinjaman, tujuan prosedur pemberian pinjaman ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu pinjaman diterima atau ditolak.

Dalam menentukan suatu kelayakan pinjaman maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan dari calon nasabah maka pihak Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) dapat meminta kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak oleh pihak BPPKP.

Dalam penyaluran pinjaman atau kredit ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari penyuluh pembina, KPK dan GKPK mengajukan permohonan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan yaitu:

## 1. Persyaratan Administrasi

- a. Sertifikat tanah dan lain-lain, ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Hal ini dikarenakan sertifikat adalah merupakan jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit pada Bank PD. BPR Sarimadu tersebut, apabila calon peminjam atau kredit tidak menyerahkan sertifikat tanah atau yang lainnya sebagai jaminan kredit maka calon peminjampun tidak akan bisa memperoleh pinjaman yang diinginkan.
- b. Foto kopi KK pengurus dan anggota, setiap calon peminjam harus menyerahkan foto kopi KK pengurus dan anggota sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Persyaratan ini sebagai bahan pertimbangan bagi BPPKP untuk meninjau lanjut surat permohonan yang telah diajukan.
- c. Foto kopi KTP pengurus dan anggota, persyaratan ini sebagai bukti tempat tinggal calon peminjam yang juga menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BPPKP untuk mencairkan permohonan pinjaman tersebut. Calon peminjam atau anggota harus berdomisili di daerah sekitar Kecamatan Bangkinang Seberang.
- d. Fas foto warna terbaru (4X6 cm) pengurus dan anggota masing-masing 4 lembar, ini adalah sebagai syarat tambahan bagi pihak BPPKP agar dapat mengetahui wajah calon peminjam, jika dalam permohonan persyaratan

ini belum terpenuhi maka calon peminjam dapat menyerahkan pada waktu yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

- e. Mengisi blangko permohonan yang ditujukan ke Direksi Bank PD. BPR Sarimadu melalui Kepala Badan BPPKP. Blangko permohonan ini terdiri dari nama kelompok, jumlah anggota, tahun berdiri, jenis usaha, tahap pinjaman, alamat kelompok, besarnya permohonan pinjaman dan jangka waktu pinjaman.
- f. Surat pernyataan tanggung rentang, yang berisikan tentang:
  - 1) Untuk melunasi angsuran pinjaman atau kredit sesuai dengan periode pembayaran yang telah tertuang dalam akat kredit.
  - 2) Bila terjadi tunggakan dari sebagian pengurus / anggota kelompok dalam pembayaran angsuran kredit, maka tunggakan tersebut akan ditanggung oleh pengurus / anggota yang lain, sehingga jumlah pembayaran angsuran pinjaman/kredit tetap berjalan sesuai dengan periode pembayaran.
  - 3) Kami pengurus / anggota kelompok bersedia jaminan kami tidak diberikan oleh pihak bank, sebelum seluruh kewajiban kelompok dilunasi.

## 2. Persyaratan Fisik Calon Nasabah

- a. Diupayakan calon peminjam mempunyai penghasilan tetap yang bisa didukung dengan dana pinjaman atau kredit yang diberikan.

- b. Mempunyai hasil produksi yang bisa dijadikan sebagai jaminan dan mencukupi untuk membayar hutangnya, jika hasil yang dimiliki adalah hasil bersih setelah dipotong tanggungannya baik tanggungan rumah tangga maupun tanggungan untuk merawat dan meningkatkan hasil produksi.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa jika seseorang atau calon nasabah ingin meminjam dana, maka calon peminjam tersebut mendatangi BPP di Kecamatan masing-masing dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti jaminan, kemudian mengisi blangko permohonan pinjaman. Pihak BPP bermusyawarah apakah bisa dilanjutkan ke BPPKP atau tidak, jika dilanjutkan maka pihak BPPKP bermusyawarah lagi apakah pinjaman tersebut bisa dicairkan atau tidak, jika pinjaman tersebut dicairkan, maka BPPKP mencairkannya melalui Bank PD. BPR Sarimadu dan beberapa pertimbangan nasabah menandatangani perjanjian tentang ketentuan pengembalian dengan tambahan 2,5% perbulan.<sup>36</sup>

Sebelum mengetahui pemanfaatan dana pinjaman, maka kita harus mengetahui usaha apa yang mereka jalani dan berapa besar mereka mendapatkan pinjaman dan kita harus mengetahui apakah modal yang dia dapat dipergunakan seluruhnya untuk usaha, dan apa landasan mereka dalam meminjam dana.

Jadi penulis menyebarkan angket berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai penyaluran dana pinjaman pada BPPKP tersebut. Dari tabel berikut

---

<sup>35</sup> Sihombing (Ketua P2K), *wawancara*, Bangkinang, tanggal 07 April 2011

<sup>36</sup> Beti, (pengurus P2K), *wawancara*, Bangkinang, tanggal 07 April 2011

dapat diketahui tanggapan responden dalam menjalani usaha yang dijalankannya maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. IV. 1**  
**Tanggapan Responden Tentang Usaha Yang Dijalani**  
**Pada P2K Kec. Bangkinang Seberang**

No	Jawaban	Kelompok	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
1	Warung	0	0	0
2	Sayur-sayuran	6	49	100
3	Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	6	49	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, kelompok KPK tidak ada yang memilih untuk menjalankan usahanya dibidang warung maupun dibidang yang lain-lainnya, tetapi KPK atau responden lebih memilih untuk menjalankan usahanya dibidang sayur-sayuran yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar (100 %)

Bapak Ilyas ketua KPK mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk memanfaatkan tanah yang kosong, apalagi dari segi penjualan sayur-sayuran banyak permintaan pasar,<sup>37</sup>

Untuk mengetahui berapa besar tiap-tiap kelompok memperoleh dana pinjaman, maka dapat dilihat dari tabel 2 berikut:

---

<sup>37</sup> Ilyas, (Ketua KPK), *Wawancara*, Bangkinang Seberang, tanggal 09 April 2011

**Tabel. IV. 2**  
**Tanggapan Responden Tentang Besar Pinjaman**  
**Pada P2K Kec. Bangkinang Seberang**

No	Jawaban	Kelompok	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
1	Rp. 1.000.000,-	2	16	32,65
2	Rp. 1.500.000,-	3	23	46,94
3	Diatas Rp. 2.000.000	1	10	20,41
	Jumlah	6	49	100

Kelompok yang menyatakan Rp.1.000.000 mendapatkan dana pinjaman ada dua kelompok dengan 16 responden atau sebesar (32,65 %), dan yang Rp.1.500.000 dana pinjaman ada tiga kelompok dengan 23 responden atau sebesar (46,94 %), dan diatas pinjaman Rp.2.000.000 ada satu kelompok dengan 10 responden atau sebesar (20,41%).

Kelompok Petani Kecil (KPK) yang mendapatkan dana pinjaman Rp.1.000.000, kelompok ini kedua kalinya mendapatkan dana pinjaman, kalau hasil pertaniannya lebih bagus maka untuk pinjaman selanjutnya, bisa memilih berapa besar permohonan pinjaman yang dibutuhkan oleh KPK.<sup>38</sup>

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang perolehan dana pinjaman yang mereka peroleh, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>38</sup> Sihombing (Ketua P2K) *wawancara*, Bangkinang, tanggal 04 April 2011

**Tabel. IV. 3**

**Tanggapan Responden Mengenai Apakah Seluruh Modal Bersumber  
Pada P2K Kec. Bangkinang Seberang**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Responden)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Ya	3	26	53,06
2	Sebagian	2	16	32,65
3	Tidak	1	7	14,29
	Jumlah	6	49	100

Adapun responden yang menyatakan sumber modal berasal dari program pemerintah atau dari dana pinjaman dari P2K yang dikelola oleh BPP Bangkinang Seberang ada 3 kelompok dengan 26 responden atau sebesar (53,06 %), yang menyatakan bahwa sebagian modal bersumber dari dana pinjaman P2K Bangkinang Seberang ada dua kelompok dengan 16 responden atau sebesar (32,65 %), dan yang menyatakan modal tidak bersumber dari P2K ada 1 kelompok dengan 7 responden atau sebesar (14,29 %).

Responden yang menyatakan modal tidak berasal dari dana pinjaman program P2K karena para responden kecewa karena pinjaman yang mereka miliki tidak merasa cukup dengan pinjaman dana yang mereka peroleh.

Untuk melihat bagaimana alasan responden untuk ikut meminjam dana dari program pemerintah dapat kita lihat dari tabel berikut:

**Tabel. IV. 4**

**Tanggapan Responden Tentang Alasan Ikut Meminjam  
Pada P2K Kec. Bangkinang Seberang**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Responden)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Karena saya memerlukannya	3	41	83,67
2	Iku – ikutan saja	3	8	16,33
	Jumlah	6	49	100

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada tiga kelompok dengan 49 responden atau sebesar (83,67 %) menyatakan bahwa mereka memerlukan dana pinjaman, dan ada tiga kelompok sebanyak 8 responden atau sebesar (16,33 %) menyatakan bahwa mereka hanya ikut-ikutan saja.

Responden yang ikut-ikutan saja dalam meminjam dana ini, karena para responden sudah memiliki modal, sehingga mereka meminjam dana tersebut hanya untuk penambahan modal saja.

Untuk mengetahui bagaimana alasan responden dengan memanfaatkan dana pinjaman tersebut, dapat kita lihat dari tabel 8 berikut ini:



**Tabel. IV. 5****Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pinjaman**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Responden)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Untuk membantu modal usaha	3	23	46,94
2	Untuk konsumtif	2	18	34,69
3	Untuk lain – lainnya	1	8	18,37
	Jumlah	6	49	100

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada dua kelompok dengan 18 responden atau sebesar (34,69 %) menyatakan bahwa dana yang berasal dari dana program pemerintah digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan ada tiga kelompok dengan 23 responden atau sebesar (46,94 %) menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu modal usaha, sedangkan ada satu kelompok dengan 8 responden (20,69 %) menyatakan dana tersebut dipergunakan untuk yang lain-lainnya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bentuk penggunaan dana pinjaman dilakukan untuk:

- a. Untuk membantu modal usaha, responden yang menyatakan dana yang berasal dari pemerintah, dipergunakan sepenuhnya untuk mengembangkan usahanya supaya lebih luas.

- b. Untuk konsumtif, responden yang menyatakan dana berasal dari pemerintah, dikarenakan dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya, seperti membeli perlengkapan-perengkapan dapur.
- c. Untuk lain-lainnya, para peminjam menggunakan dana nya untuk keperluan lain-lainnya, seperti untuk membiayai sekolah anaknya, keperluan perlengkapan sekolah anaknya dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kepuasan setelah mendapatkan dana pinjaman yang mereka peroleh untuk usahanya, kita lihat tabel berikut ini:

**Tabel. IV. 6**

**Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Setelah Mendapatkan Dana Pinjaman**

No	Jawaban	Kelompok	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
1	Iya	4	45	91,84
2	Tidak	0	0	0
3	Kurang Membantu	2	4	8,16
	Jumlah	6	49	100

Dari data diatas dapat kita lihat, ada empat kelompok dengan 45 responden atau sebesar (72,41 %) mereka terbantu dengan dana pinjaman dari pemerintah yang dijalankan oleh BPPKP yang dikelola oleh bagian P2K, dan tidak ada responden yang tidak terbantu dengan dana pinjaman tersebut,

sedangkan ada dua kelompok dengan 4 responden (8,16 %) menyatakan kurang membantu dalam mendapatkan suatu pinjaman.

Dengan adanya dana pinjaman ini, kami merasa senang karena dana pinjaman yang kami dapat bisa separonya kami manfaatkan atau digunakan untuk keperluan rumah tangga kami ataupun untuk keperluan lain-lainnya.<sup>39</sup>

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pemanfaatan pinjaman dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel. IV. 7**

**Tanggapan Responden Terhadap Pemanfaatan Pinjaman  
Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kecil**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Responden)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sangat membantu petani kecil	3	41	83,67
2	Tidak membantu petani kecil	1	3	6,12
3	Kurang Membantu	2	5	10,21
	Jumlah	6	49	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, ada 3 kelompok dengan 41 responden atau sebesar (83,67%) menyatakan bahwa program P2K sangat meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil melalui penyaluran dan pemanfaatan pinjaman, sedangkan satu kelompok dengan 3 responden atau sebesar (6,12 %)

---

<sup>39</sup> Mazwir, (Anggota KPK Bangkinang Seberang), *Wawancara*, Bangkinang Seberang, 17 April 2011

menyatakan tidak membantu masyarakat kecil, dan ada dua kelompok dengan 5 responden (10,21 %) menyatakan kurang membantu atas pinjaman tersebut.

Seperti yang dialami bapak Yudi selaku ketua KPK yang memperoleh dana pinjaman dari program pemerintah menyatakan bahwa, begitu banyak lahan-lahan kosong yang harus di garap, namun ia tidak sanggup untuk menggarap sendiri, namun ia mencari solusi, untuk mengajak teman-teman untuk bisa berkerja sama dalam mengelola lahan-lahan tersebut, setela mendapatkan teman-teman lalu ia mencari solusi untuk bisa mendapatkan dana dari pemerintah. Namun setelah bapak Yudi dan teman-temannya mendapatkan dana dari pemerintah, mereka menggunakan dananya untuk mengembangkan usaha tani nya.<sup>40</sup> Mereka merasa terbantu dengan adanya dana pinjaman dari pemerintah

Namun dari data yang penulis peroleh melalui penyebaran angket ada anggota KPK yaitu 3 responden (6,12 %) menyatakan tidak membantu petani kecil, atas pinjaman tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan KPK tersebut ia berpendapat bahwa pinjaman dari pemerintah tidak terlalu besar dalam mengembangkan usaha pertanian.

---

<sup>40</sup> Yudi (ketua KPK) *Wawancara*, Bangkinang Seberang, tanggal 23 April 2011.

## **B. Dampak Hasil Pertanian Dengan Adanya Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil**

Untuk mengetahui dampak hasil pertanian, dengan adanya dana pinjaman dapat diketahui berdasarkan angket yang penulis sebarakan mengenai dampak hasil pertanian dari pinjaman yang telah diperoleh oleh nasabah / KPK, sebagai berikut:

**Tabel. IV. 8**

**Tanggapan Responden Tentang Hasil Pertanian**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Responden)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Meningkat	3	23	46,94
2	Kurang meningkat	1	10	20,41
3	Menurun	2	16	32,65
	Jumlah	6	49	100

Dari data di atas dapat kita lihat, ada tiga kelompok dengan 23 responden atau sebesar (46,94 %) menyatakan hasil usahanya meningkat sejak diberikan dana pinjaman oleh BPPKP, dan ada satu kelompok dengan 10 responden (20,41 %) menyatakan bahwa hasil pertaniannya kurang meningkat, dan ada dua kelompok dengan 16 responden (32,65 %) menyatakan bahwa hasil pertaniannya itu menurun.

Mereka menyatakan bahwa hasil usahanya menjadi lebih meningkat dikarenakan dana pinjaman tersebut betul-betul dipergunakan untuk menambah modal disertai dengan keahlian mereka dalam mengelola keuangan. Sedangkan responden yang menyatakan usahanya kurang meningkat, karena dana yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk menambah modal pertaniannya. Dan responden yang mengalami penurunan dalam mengelola pertaniannya, mereka tidak sepenuhnya untuk mengembangkan usaha pertaniannya.

Untuk mengetahui apa penyebab atau alasan yang menyebabkan hasil pertaniannya dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. IV. 9**

**Tanggapan Responden Tentang faktor yang Menyebabkan Hasil Pertaniannya**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah (Responden)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Usaha yang kami jalani berjalan dengan baik	3	23	46,94
2	Usaha yang kami jalani tidak berjalan dengan baik	3	26	53,06
3	Lain – lainnya	0	0	0
	Jumlah	6	49	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, ada tiga kelompok KPK yang mengalami peningkatan dalam mengembangkan usahanya dengan 23 responden atau sebesar (46,94%) dikarenakan usahanya berjalan dengan baik, dan ada tiga kelompok dengan 26 responden atau sebesar (53,06 %) dikarenakan usaha yang

mereka jalani tidak berjalan dengan baik, sedangkan yang dikernakan lain-lain tidak ada 0 responden.

Menurut salah seorang responden atau salah seorang ketua KPK, bapak Ilyas menyatakan bahwa, usaha yang ia jalani bersama teman-teman tidak berjalan dengan baik dikarenakan, dikelompok ia ada anggotanya meminjam dana dari pinjaman P2K untuk keperluan keluarganya, dan adapun anggotanya tidak mengerti tentang cara pemeliharaan usaha yang ia buat, jadinya usaha yang ia buat bersama-sama tidak berjalan dengan baik.<sup>41</sup>

Dengan melihat kelompok KPK yang mengalami kehabisan modal, penulis mewawancarai salah seorang ketua KPK, Ibu Jumaniram, ia mengatakan bahwa setiap anggota-anggota, banyak mempergunakan dana nya untuk keperluan rumah tangga, dengan alasan, hanya dengan dana ini untuk sementara dipergunakan untuk rumah tangga dikarenakan musim hujan, sebab banyak anggota Ibu Jumaniram yang anggotanya laki-laki yang kerja sampingannya penyadap karet, akhirnya lantaran musim hujan tidak henti-henti, jadi anggota Ibu Jumaniram tidak bisa menutup uang yang telah dia pakai untuk rumah tangganya.<sup>42</sup> Jadi dampak hasil pertaniannya menurun dikarenakan mereka tidak memperhatikan pemupukan pertaniannya.

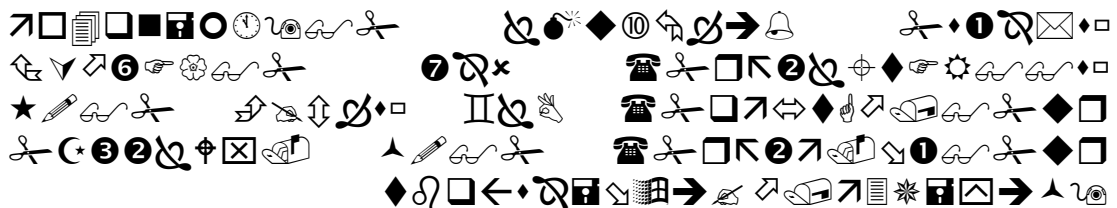
---

<sup>41</sup> Ilyas (Ketua KPK), *Wawancara*, Bangkinang Seberang, tanggal 09 April 2011

<sup>42</sup> Jumaniram (Ketua KPK), *Wawancara*, tanggal 29 April 2011

### C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil

Pemanfaatan pinjaman oleh anggota KPK lebih banyak dimanfaatkan untuk usaha produktif, seperti membuka lahan pertanian baru atau memperluas usaha tani yang ada. Dalam tinjauan ekonomi Islam terhadap pinjaman untuk usaha produktif seperti membuka usaha, karena agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena ridho Allah, sebagai mana dalam firman Allah Surat Al-Jumu'ah:10



Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Al-Jumu’ah: 10).<sup>43</sup>

Selain dari pada itu, pemanfaatan pinjaman oleh KPK atau nasabah dari P2K ada juga yang digunakan untuk hal yang bersifat konsumtif, atau lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, Hlm. 933



disepakati, Sungguh Al-Qur`an telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

... وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya....”*  
(An-Nahl: 91)<sup>44</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”* (Al-Isra`: 34)<sup>45</sup>

Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

Menepati janji merupakan akhlaq yang mulia sebagai buah keimanan seseorang. Artinya, siapa yang tidak lagi menepati janjinya (mengingkari

---

<sup>44</sup> Departemen Agama R.I, *op, cit.* Hlm. 415-416

<sup>45</sup> Departemen Agama R.I, *op, cit.* Hlm. 429

janjinya) berarti pertanda merosotnya keimanannya. Iman orang yang tidak lagi mengindahkan janji-janjinya telah ternoda.

Nilai-nilai Islam yang agung nan suci sangat tidak sejalan dengan perbuatan melanggar janji. Karena melanggar janji adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan khianat adalah tidak memenuhi amanah, dan melanggar janji adalah akhlak yang tercela.<sup>46</sup>

Namun anehnya ternyata masih banyak orang yang jika berjanji hanya sekedar igauan belaka. Dia tidak peduli dengan kehinaan yang disandangnya, karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimuti dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ  
ثُمَّ يَنْفِضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

*“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).” (Al-Anfal: 55-56)*

---

<sup>46</sup> Ahmad Mu'adz Haqqi, *Syarah 40 Hadits Tentang Akhlak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). Hlm. 35



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab pembahasan terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pemanfaatan dana pinjaman program pemberdayaan petani kecil banyak dimanfaatkan untuk produktif seperti membuka lahan baru dan ada juga untuk menambah perluasan usahanya. Namun ada juga untuk bersifat konsumtif seperti memenuhi kebutuhan hidup dan adajuga untuk keperluan lain-lainnya.
2. Dampak hasil pertanian masyarakat ada sebagian KPK sangat meningkat hasil pertaniannya, karena modal yang ia miliki benar-banar untuk mengembangkan usahanya. Namun ada juga para petani tidak mengalami peningkatan disebabkan karena ia tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani usaha yang ia jalankan.
3. Prinsip ekonomi Islam menganggap bahwa pemanfaatan dana pinjaman oleh KPK sudah sesuai atau tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, sedangkan yang melanggar perjanjian berarti pertanda merosotnya keimanannya, Iman orang yang tidak lagi mengindahkan janji-janjinya telah ternoda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu, sehubungan dengan penelitian ini, saran tersebut yaitu:

1. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah pinjaman program pemerintah di tuntut meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dana dengan cara meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada anggota KPK.
2. Untuk melakukan peningkatan dan pertumbuhan jumlah pinjaman terhadap ekonomi setiap anggota KPK meninjau atau survei terhadap dana pinjaman yang telah diberikan kepada anggota.
3. Untuk orientasi pinjaman dimasa yang akan datang, BPP dan BPPKP dituntut harus mampu menyusun suatu perencanaan yang baik, semua itu harus dapat dirumuskan dan diperkirakan dengan cermat pada saat analisis pinjaman.
4. BPP atau BPPKP dituntut untuk lebih meningkatkan peran serta dalam:
  - a. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha petani kecil.
  - b. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-Syari'ah
  - c. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Munawar, Said Agil, Husin. Prof. Dr. MA,** *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, (Jakarta: Panamadani, 2005)

**Anjayani, Eni, S.S1,** *Mengenal Beberapa Program Pembangunan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007)

**Barthos, Basir, Drs.** *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu pendekatan Makro*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

**Hadinoto, Soetanto,** *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2005), Cet ke-1

**Hasibuan, Malayu, S,P, Drs.** *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002) Cec. Ke-2

**Husaini, Waqar Ahmed,** *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka, 1983)

**Jafri, Ahmad Syafi'i,** *Fikih Muamalah*, (Pekanbaru: Susqo Press, 2000)

**Kasmir,** *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

-----, *Bank lembaga lainnya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000)

-----, Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Cet. Ke-3

**Ka'bah, Rifyal, Drs.M.A.** *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Univ Yasri Jakarta, 1999)

**Nasution, Edwin, Mustafa, M. Sc, Dkk,** *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)  
Cet ke-2

**Nawawi, Imam,** *Shahih Riyadhush-shalihin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004) Cet.  
Ke2

**Salam, Abdul,** *Koperasi Simpan Pinjam: Suistainabilitas Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta:Pancasarjana UGM, 2008)

**Shihab, Quraish, M** *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

**Sinungan, Muchdarsyah, Drs.** *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997) Cet. Ke-2

**Singgih, Wibowo, dkk,** *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000)

**Suhardjono,** *manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003)

**Suhendi, Hendi,** *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2007)

**Sukmadi, SE, dkk,** *Mengajukan Dan Mengelola Kredit Usaha Tani*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1994)

**Thomas, Suyatno, Dkk,** *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2007, Cetakan ke-4

**Tjiptoherijanto, Priyono,** *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)

**Widjaja, Haw, Prof, Drs.** *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. Ke-2

-----**.** *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

**Yasin, Fachi,** *Petani, Usaha dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan* (Pekanbaru: Unri Press, 2002)

**Yusanto, Muhammad Ismail, Dkk.** *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Cet ke-1

**Zulkarnain, Drs. M.M,** *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2003)